

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I meliputi pembahasan: (1) latar belakang penelitian, (2) rumusan masalah penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) Struktur organisasi disertasi. Untuk dapat merumuskan fokus penelitian agar lebih tepat, maka dalam bab 1 ini berisi studi pendahuluan antara lain pembahasan teori, fenomena dan urgensi penelitian.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bimbingan dan Konseling dalam pendidikan saat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi peserta didik. Meskipun keduanya adalah dua kegiatan yang berbeda namun integral dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi hidup, peserta didik memerlukan sistem layanan pendidikan di satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen, tetapi juga layanan bantuan khusus yang lebih bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling (Permendikbud, 2014).

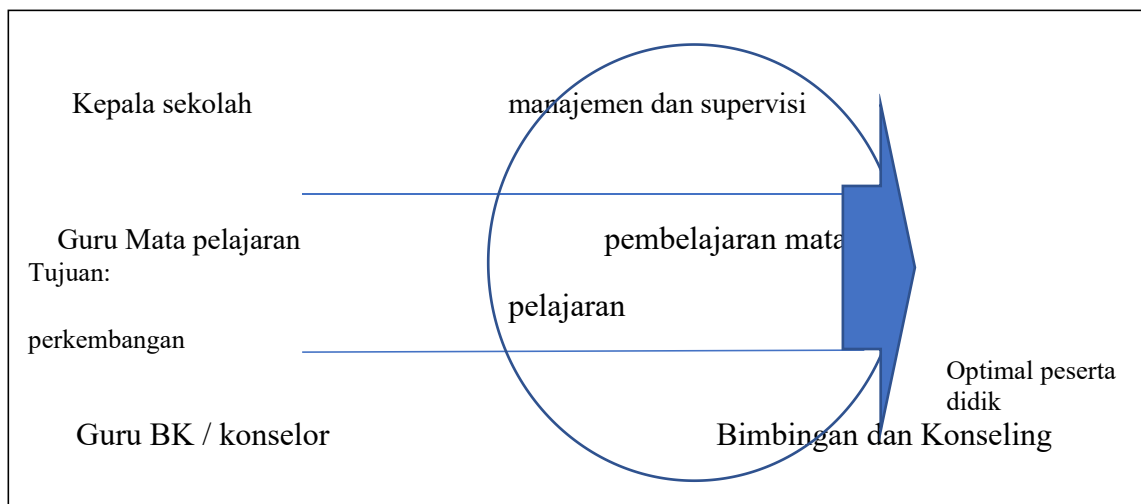
Posisi dan keunikan wilayah kerja antara guru Bimbingan dan Konseling (BK) dengan guru mata pelajaran adalah berbeda satu sama lain, namun dalam membantu perkembangan optimal peserta didik menjadi satu kesatuan yang utuh karena merupakan bagian yang integral. Dalam hal ini, ada tiga wilayah kerja yang disebut sebagai komponen yang integral. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu wilayah layanan pendidikan yang memfokuskan pada aspek psikologis dan emosional siswa. Bersinergi dengan wilayah layanan administrasi dan manajemen artinya bimbingan dan konseling bekerja sama dengan unit layanan administrasi dan manajemen dalam mengelola segala kegiatan yang terkait dengan layanan bimbingan dan konseling, seperti penjadwalan sesi konseling dan mengelola dokumen yang berkaitan dengan layanan tersebut. Sedangkan bersinergi dengan wilayah kurikulum dan pembelajaran artinya bimbingan dan konseling bekerja sama dengan unit kurikulum dan pembelajaran dalam membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dan mencapai prestasi akademik yang diharapkan. Wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan bersinergi dengan wilayah layanan administrasi dan manajemen serta wilayah kurikulum dan pembelajaran akan lebih efektif dalam membantu

Uray Herlina, 2023

PELATIHAN PENGEMBANGAN PROGRAM MODEL ASCA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMP NEGERI SE-KOTA PONTIANAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, baik masalah akademik maupun masalah psikologis dan emosional. Gambaran ketiga wilayah kerja yang integral ini terlihat pada sistem pendidikan dalam Pedoman Operasional Pelaksanaan (POP) Bimbingan dan Konseling tahun 2016, komponen tersebut digambarkan seperti pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Bimbingan dan Konseling dalam sistem pendidikan (Suryapranata, 2016)

Gambar 1.1 di atas telah memperjelas antara posisi kepemimpinan (dalam manajemen dan supervisi) di sekolah, sejajar dengan guru mata pelajaran (layanan pembelajaran) yang mendidik serta Guru BK (layanan Bimbingan dan Konseling) yang memandirikan. Dalam menjalankan tugasnya, Guru BK perlu bekerjasama dengan kedua belah pihak tersebut, berkolaborasi juga dengan pemangku kepentingan lain seperti wali kelas, komite sekolah, orang tua peserta didik, dan pihak-pihak lain yang relevan. Mereka merupakan mitra kerja yang saling berhubungan satu sama lain, meskipun masing-masing memiliki tugas atau wilayah kerjanya sendiri (Suryapranata, 2016).

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh guru BK (Bimbingan dan Konseling) untuk membantu peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Layanan ini dilakukan secara sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram, dengan tujuan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli agar dapat mencapai kemandirian (Kartadinata S. , 2011.). Melalui layanan ini, guru BK akan membantu peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab. Layanan bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dihadapinya, membantu mereka mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta membantu mereka mencapai

Uray Herlina, 2023

kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sebelum membuat program kerjanya, seorang guru BK terlebih dahulu perlu melakukan kajian filosofis tentang hakikat manusia atau individu yang menjadi sasaran layanannya tersebut. Dengan wawasan tentang hakikat manusia, guru BK akan mampu membuat keputusan berkenaan dengan konsep maupun pelaksanaan Bimbingan dan Konseling selanjutnya. Guru BK yang memahami hakikat manusia adalah bagaimana ia mampu memaknai manusia secara utuh.

Keberhasilan peserta didik di sekolah turut ditentukan oleh peran guru BK/konselor sekolah (Trish Hatch, 2015). Hasil dari kinerja guru BK/konselor dalam beberapa dekade terakhir semakin dituntut untuk memberikan kontribusi pada keberhasilan siswa, terutama prestasi akademik siswa (Otwell, 1997). Sebagai pendidik, guru BK melakukan beberapa langkah kerja yang penting bagi keberhasilan peserta didik, di antaranya: melakukan asesmen, pengumpulan data tentang peserta didik, pemberian berbagai layanan Bimbingan dan Konseling dan membantu siswa menentukan arah karir peserta didik (Dahir C. B., 2004).

Penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling yang profesional memerlukan perhatian serius, melalui kinerja guru Bimbingan dan Konseling yang juga harus memiliki kompetensi ideal. Kinerja pendidik di Indonesia, termasuk guru Bimbingan dan Konseling, saat ini ditengarai cukup rendah dan memprihatinkan. Ilfiandra menemukan bahwa 64% kinerja guru Pembimbing (guru BK) memiliki kinerja yang tidak memuaskan, sedangkan Furqon menemukan lebih dari 48% dari keseluruhan kelompok yang dinilai secara independen menunjukkan tingkat keefektifan yang rendah. “Mutu kinerja guru BK yang tidak ditingkatkan dikhawatirkan akan sulit meningkatkan citra profesi guru BK”. Selain itu, kompetensi konselor dalam bidang asesmen masih perlu ditingkatkan untuk dapat memenuhi standar minimal kinerja guru atau guru BK profesional, yaitu kategori cukup ke atas (Nurhudaya, 2012).

Hasil riset lain menunjukkan bahwa rata-rata guru BK kurang memiliki; konsep perilaku dan perkembangan konseli, konsep dan praksis asesmen untuk mengenali konseli, kurang terampil dalam menyiapkan, mengadministrasikan, menafsirkan, dan menyajikan informasi statistik tentang hasil asesmen, melaporkan hasil asesmen, kurang terampil mengadaptasi, dan menggunakan teknik non tes dan teknik lainnya (Hajati, 2010; Nurrahmi, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa “peningkatan mutu atau kualitas pelayanan Bimbingan dan Konseling didukung dengan profesionalitas guru BK” (Berru Amalianita, 2021)

Hasil wawancara dan observasi pada studi pendahuluan terkait faktor persiapan dan pelaksanaan layanan yang juga belum maksimal seperti kekurangan waktu di sekolah untuk

Uray Herlina, 2023

membuat perangkat layanan, adanya kesibukan atau tugas lain di sekolah, ketiadaan jam masuk kelas juga turut menjadi kendala bagi guru BK. Kemudian motivasi kerja yang rendah, yang juga ternyata berkaitan dengan faktor dari luar seperti fasilitas yang tidak tersedia untuk memfasilitasi pekerjaan Bimbingan dan Konseling seperti penyediaan kertas, printer, komputer, tidak ada lemari arsip yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen-dokumen penting dalam layanan Bimbingan dan Konseling, demikian juga faktor pimpinan di sekolah dimana dukungan pimpinan di sekolah adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kualitas layanan Bimbingan dan Konseling. Selain itu faktor kerjasama dengan pihak lain di sekolah juga turut memperlancar dan meningkatkan layanan Bimbingan dan Konseling.

Fenomena yang peneliti temukan di atas, sejalan dengan salah satu riset di SMP dan SMA kota Bandung menunjukkan standar kelayakan untuk melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling yang berkualitas pada dimensi-dimensi tertentu menunjukkan tingkat penguasaan yang kurang memadai, terutama berkaitan dengan kompetensi: (a) pengelolaan program Bimbingan dan Konseling; (b) konsep dan praksis riset dan evaluasi Bimbingan dan Konseling; (c) konsep dan praksis asesmen; dan (d) Kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan program layanan Bimbingan dan Konseling. Sehingga kualitas layanan Bimbingan dan Konseling menunjukkan sebanyak 65,7% responden menyatakan buruk, 22,30% responden menyatakan baik, dan 12% responden menyatakan ideal (Uman Suherman., 2011). Penurunan kinerja profesional guru BK terkadang disebabkan oleh guru BK yang sudah merasa puas dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki, sehingga tidak melakukan Langkah-langkah pengembangan diri (Sudrajat A., 2008).

Peneliti juga menemukan beberapa fakta yang menunjukkan bahwa sebagian besar masih ada guru BK hanya menyalin program lama dan tidak melakukan proses asesmen sebelum merencanakan program Bimbingan dan Konseling, kurangnya kerjasama dengan pihak lain seperti guru bidang studi atau pihak lain dalam mengevaluasi program. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dibuat masih berdasarkan kebutuhan guru BK saja, belum berdasarkan pada asesmen kebutuhan peserta didik atau evaluasi yang mendalam. Isi program yang kurang tepat sasaran dan evaluasi program yang tidak maksimal akan menurunkan mutu layanan.

Kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa menurunnya kinerja profesional guru BK akan berimbas pada menurunnya kualitas atau mutu program Bimbingan dan Konseling. Penurunan mutu layanan Bimbingan dan Konseling dapat disebabkan oleh beberapa factor, seperti tidak adanya jam tatap muka atau jam bimbingan di dalam kelas. Sejak tahun 2018,

Uray Herlina, 2023

dimana sebagian besar SMP tidak lagi memiliki jam bimbingan di kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua MGBK dan guru BK, mereka mulai kesulitan melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling secara maksimal terutama layanan klasikal. Semua tergantung pada kebijakan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah.

Ketiadaan jam tatap muka dengan peserta didik menimbulkan ketidaksesuaian antara program yang telah dibuat dengan pelaksanaan kegiatan guru BK di lapangan (observasi dari tanggal 22 januari sampai 15 maret 2021). Beberapa hasil riset menunjukkan beberapa faktor kesulitan belajar secara tatap muka dimasa pandemi covid-19 disebabkan; dukungan orang tua peserta didik dan fasilitas yang tidak memadai (Martha Niya, 2022), selain itu siswa kurang memahami materi pembelajaran, siswa tidak memiliki telepon, siswa tidak mengerjakan tugas, dan siswa tidak bisa melakukan praktek (Fauziah Sri Karmala, 2021), biaya yang kurang memadai untuk paket data, dan jaringan internet yang lambat (Zainal Fauzi, 2020). Guru dituntut untuk kreatif dan mampu menciptakan inovasi baru dalam pembelajaran daring/online ini, tanpa terkecuali pada guru BK. Tanpa pembelajaran tatap muka, para guru kesulitan memberikan pemahaman yang akurat kepada peserta didik karena semua dilakukan secara online termasuk layanan Bimbingan dan Konseling (Pratiwi, 2020).

Peningkatan mutu pelayanan Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan dengan melakukan proses evaluasi. Penilaian dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan program atau layanan Bimbingan dan Konseling (Faricha Azizah, 2017). Terdapat tiga jenis evaluasi dalam kerangka kerja Bimbingan dan Konseling Komprehensif, yaitu: evaluasi personel atau evaluasi kinerja, evaluasi program, dan evaluasi hasil (Henderson N. C., 2006). Salah satu hasil penelitian mendeskripsikan bahwa perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi Bimbingan dan Konseling dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik secara akademik dan non akademik. Dimana hasil temuannya menunjukkan tidak semua SMP dapat menjalankan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Bimbingan dan Konseling dikarenakan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti; kurangnya tenaga layanan, sarana dan prasarana yang terbatas, dan tidak semua menjalankan evaluasi Bimbingan dan Konseling setiap bulan, semester dan tahunan (Almawijaya, 2015).

Adapun penyebab dari ketidakterlaksanaan evaluasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa evaluasi tidak dilaksanakan pada salah satu Sekolah Menengah Pertama dikarenakan tujuh penyebab yang memiliki persentase di atas 50% yaitu; kurangnya anggaran, kurang mampu menetapkan kriteria, serta ketersediaan rasio guru BK dan siswa masing-masing sebesar 60%. Penyebab ketidakterlaksanaan yang

Uray Herlina, 2023

memberikan kontribusi sebesar 70% didapat dari beban kerja terlalu banyak, kurang lengkapnya data BK, dan adanya tenaga yang merangkap. Sedangkan penyebab yang memiliki persentase paling tinggi adalah kurangnya keterampilan melakukan evaluasi program BK yaitu sebesar 80% (Badrujaman, 2012). Tidak terlaksananya evaluasi akan menyebabkan menurunnya mutu layanan Bimbingan dan Konseling.

Berkaitan dengan mutu, Syaiful Sagala menjelaskan bahwa “strategi untuk memenangkan persaingan mutu adalah otonomi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang harus disertai dengan tanggung jawab atau akuntabilitas” (dalam Simanungkalit, 2013). Guru BK hendaknya terlibat dalam merancang program standar yang berfokus pada peningkatan harapan siswa dalam wilayah akademik, karir, dan Individual/sosial. Kerangka kerja dirancang untuk mengawal konselor sekolah dan tim Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan berbagai data dan alat-alat akuntabilitas saat mereka merancang, mengkoordinasi, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi efisiensi program konseling sekolah dan efektivitas untuk keberhasilan siswa (Dahir C. B., 2004). Sejalan dengan itu, hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama (MGBK SMP) Kota Pontianak (terlampir), bahwa selama ini pemahaman para guru Bimbingan dan Konseling terhadap akuntabilitas hanya pada evaluasi dan laporan pertanggung jawaban hasil layanan Bimbingan dan Konseling kepada kepala sekolah. Hal ini dikarenakan belum adanya pihak yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas dalam program Bimbingan dan Konseling terkait dengan peningkatan mutu program Bimbingan dan Konseling di sekolah.

Bimbingan dan Konseling komprehensif menetapkan tiga proses yang harus dipenuhi sebagai bentuk keseluruhan proses akuntabilitas yaitu standar kinerja konselor sekolah, audit program dan laporan hasil (Dahir C. B., 2004). Umumnya dua dari tiga proses di atas yang telah dilaksanakan oleh para guru BK di Indonesia. Hanya audit program yang belum dilakukan dan masih merupakan suatu hal yang belum lumrah atau belum pernah dilaksanakan. Audit program adalah kegiatan yang dilakukan guru BK bersama komponen yang terlibat dalam organisasi sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keseluruhan pelaksanaan program (Curry, 2007). Audit program sekolah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengecek kesesuaian program sekolah dengan standar yang telah ditetapkan, baik standar internal maupun standar eksternal seperti Model Nasional Program BK dari ABKIN.

Audit program juga bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan program sekolah, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan program di masa yang akan datang. Audit

Uray Herlina, 2023

PELATIHAN PENGEMBANGAN PROGRAM MODEL ASCA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMP NEGERI SE-KOTA PONTIANAK
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

program sekolah biasanya dilakukan oleh seorang auditor atau tim auditor yang terdiri dari ahli di bidangnya, yang bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan metode-metode lainnya. Setelah melakukan audit program, auditor akan menyusun laporan audit yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan program sekolah.

Peningkatan mutu layanan, memerlukan kompetensi dan kinerja yang lebih baik. Kompetensi dan kinerja akan lebih baik apabila guru memiliki keterampilan yang lebih baik juga. Hal ini bisa di asah melalui sebuah pelatihan. Pelatihan adalah salah satu kegiatan pengembangan diri yang penting, untuk membantu guru BK memiliki lebih banyak keterampilan dalam hal meningkatkan kompetensi (Nurrahmi, 2015), dan meningkatkan komunikasi kepada peserta didik (Hadi Suprpto Arifin, 2019). Wadah organisasi seperti Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), serta dinas Pendidikan, berperan penting dalam mengembangkan pengetahuan dan kompetensi para guru BK agar lebih professional dalam mengelola dan melaksanakan program Bimbingan dan Konseling.

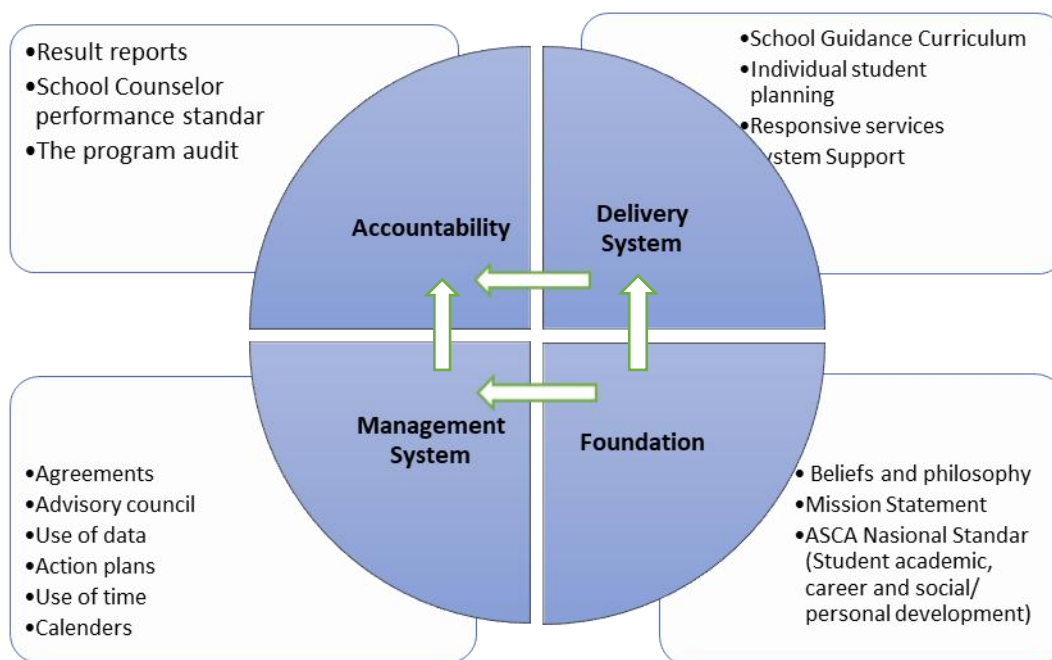
Sehubungan dengan peran organisasi profesi dan Dinas Pendidikan kota terhadap perkembangan kompetensi guru BK ini, telah mengadakan beberapa kegiatan dalam bentuk pelatihan beberapa tahun terakhir (sejak 2019-2022) melalui daring/online dikarenakan pandemic covid-19. Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat antara lain berupa Bimtek Karya Tulis Ilmiah, penelitian Jurnal, dan pembelajaran di masa covid-19. Sejak tahun 2019 hingga saat ini peran MGBK dan ABKIN belum maksimal. Sementara para guru BK sebagian besar berusaha meningkatkan diri melalui beberapa pelatihan atau kegiatan pengembangan diri salah satunya saat ini (mulai tahun 2021) sedang berlangsung adalah terlibat dalam kurikulum merdeka belajar sebagai guru penggerak yang diadakan oleh pemerintah. Meskipun belum semua guru bisa terseleksi dalam program ini, setidaknya program tersebut menjadi motivasi untuk guru BK agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Artinya bahwa, telah ada beberapa usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan professional secara berkelanjutan dari para guru BK, meskipun tugas utama dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program kemudian terabaikan.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah, untuk menghasilkan sebuah pelatihan yang dapat meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling di SMP. Peneliti telah melakukan beberapa kajian dari beberapa teori dan konsep program kerja, untuk menemukan model yang

cocok dan mudah untuk diterapkan oleh guru BK dalam mengelola program menjadi lebih maksimal dan akuntabel. Guru BK sangat perlu menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Adanya program yang sistematis, memerlukan suatu kondisi tertentu untuk dipertanggungjawabkan, sedangkan kondisi untuk dipertanggungjawabkan memerlukan standar sebagai ukuran keberhasilan atau prestasi yang dicapai oleh guru Bimbingan dan Konseling.

Model pelatihan yang dihasilkan merupakan kajian dan perpaduan yang diambil dari Kerangka kerja utuh Bimbingan dan Konseling komprehensif di Indonesia, yang kemudian dijembatani atau dilengkapi oleh kerangka kerja model ASCA yang kemudian disesuaikan dengan dengan kondisi dan kebutuhan guru-guru BK di lapangan. Alasan mengapa menggunakan model ASCA sebagai landasan dalam pembuatan model, adalah untuk melengkapi unsur audit program dan akuntabilitas yang belum dilaksanakan oleh guru BK di sekolah. Agar program yang dibuat mendapatkan evaluasi yang lebih akurat, sehingga dapat meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling. Selain itu, guru BK meningkatkan kompetensi dalam mengelola program lebih baik. Mewujudkan kompetensi guru BK dalam memahami proses akuntabilitas terhadap program Bimbingan dan Konseling yang sudah tercantum dalam kerangka kinerja utuh BK, namun belum pernah terlaksana. Hal ini dikarenakan para guru BK belum mendapat pengetahuan atau penjelasan atau panduan tentang hal tersebut pada Undang-undang maupun peraturan menteri hingga saat ini.

Untuk mengatasi kerancuan tugas konselor sekolah dihadapan kepala sekolah, para administrator, para guru, orang tua peserta didik yang terkadang menyalahartikan peran konselor, American School Counselor Association (ASCA) menerbitkan model kerangka kerja dalam program konseling (Dahir C. B., 2004), berisi empat komponen yaitu komponen *delivery system, fondation, management system and accountability*. Berikut gambar dari kerangka kerja ASCA yang dijadikan dasar pembuatan pelatihan pengembangan program model ASCA untuk meningkatkan mutu program dalam penelitian ini, meliputi:



Gambar 4.2 Kerangka kerja BK menurut ASCA (Dahir C. B., 2004)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa keempat bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta berkelanjutan. Empat komponen utama dalam kerangka kerja ASCA meliputi: (1) *Fondation* (fondasi), yang mensyaratkan pelaksanaan kepercayaan/keyakinan, filosofi dan misi dimana setiap peserta didik akan mendapatkan keuntungan dari program konseling sekolah; (2) *Delivery System* (sistem penyampaian), yang mendefinisikan proses implementasi dan komponen model komprehensif, yaitu layanan dasar, perencanaan individual peserta didik, layanan responsif, dan dukungan sistem; (3) *Management System* (system manajemen), menyajikan proses organisasi yang diperlukan untuk menyampaikan program konseling sekolah yang komprehensif mencakup kesepakatan tanggung jawab, badan penasehat, penggunaan data, rencana tindakan untuk rencana layanan/kurikulum, penggunaan kalender, penggunaan waktu dan tugas; serta (4) *Accountability* (pertanggungjawaban), yang membantu konselor sekolah menunjukkan efektivitas kerja mereka dalam hal yang terukur seperti dampak dari waktu ke waktu, laporan hasil, standar performa konselor sekolah, dan penggunaan audit program (Dahir C. B., 2004). Kerangka inilah yang menjadi salah satu dasar pembentukan struktur model pelatihan akuntabilitas untuk meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling.

Topik analisis penelitian ini yaitu pelatihan pengembangan program model ASCA untuk meningkatkan mutu program BK pada SMP Negeri se-kota Pontianak. Berdasarkan paparan di atas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kondisi mutu program

Uray Herlina, 2023

PELATIHAN PENGEMBANGAN PROGRAM MODEL ASCA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMP NEGERI SE-KOTA PONTIANAK
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bimbingan dan Konseling yang ada pada SMP Negeri se kota Pontianak, serta mencari solusi bagaimana cara meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling. Dengan melakukan pengembangan pada instrumen dan produk yang diharapkan mampu memenuhi tujuan penelitian tersebut. Temuan penelitian ini menjadi dasar dalam menyusun atau merumuskan pelatihan pengembangan program yang dapat membantu guru BK dalam meningkatkan mutu/kualitas program Bimbingan dan Konseling di sekolah.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada studi pendahuluan dan studi literatur serta hasil riset sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa identifikasi masalah dalam pengembangan akuntabilitas, antara lain: menurunnya kinerja professional guru Bimbingan dan Konseling yang berimbas pada menurunnya kualitas atau mutu program Bimbingan dan Konseling yang telah dilaksanakan, belum ada pengenalan dan keterlaksanaan akuntabilitas, dan belum tersedianya panduan dan instrument untuk menilai mutu program Bimbingan dan Konseling.

Atas dasar itulah maka perumusan masalah utama penelitian ini yaitu "Pelatihan pengembangan program model ASCA untuk meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling pada SMP Negeri se-kota Pontianak" selanjutnya rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

1. Seperti apa mutu program Bimbingan dan Konseling pada SMP Negeri se-kota Pontianak?
2. Seperti apa rumusan pelatihan pengembangan program model ASCA untuk meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling pada SMP Negeri se-kota Pontianak?
3. Bagaimana dampak pelatihan pengembangan program model ASCA terhadap peningkatan mutu program Bimbingan dan Konseling pada SMP Negeri se-kota Pontianak?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Berdasarkan fokus masalah yang telah disusun, penelitian ini secara umum dimaksudkan untuk menghasilkan pelatihan pengembangan program model ASCA yang dapat meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling pada SMP Negeri se-Kota Pontianak.

1.3.2 Tujuan khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan:

Uray Herlina, 2023

PELATIHAN PENGEMBANGAN PROGRAM MODEL ASCA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMP NEGERI SE-KOTA PONTIANAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Mutu program Bimbingan dan Konseling pada SMP Negeri se-Kota Pontianak.
- b. Rumusan pelatihan pengembangan program model ASCA untuk meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling pada SMP Negeri se-Kota Pontianak.
- c. Hasil uji coba pelatihan pengembangan program model ASCA untuk meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling pada SMP Negeri se-Kota Pontianak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritik

Manfaat penelitian ini secara teoritik adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengayaan penelitian dalam bidang manajemen Bimbingan dan Konseling. Terutama terkait dengan upaya peningkatan mutu program Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Menengah Pertama.

1.4.2 Manfaat Praktik

Pelatihan pengembangan program model ASCA untuk meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling pada SMP Negeri se-kota Pontianak ini secara praktis bermanfaat bagi :

- a. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Bimbingan dan Konseling, hasil penelitian dapat menjadi kajian dan referensi dalam mata kuliah manajemen Bimbingan dan Konseling.
- b. Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) khususnya pada tingkat SMP, sebagai referensi untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi guru BK di SMP sesuai dengan kebutuhan saat ini.
- c. Guru BK SMP, melalui pelatihan yang diberikan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, meningkatkan kompetensi mengelola program serta mampu melaksanakan akuntabilitas program Bimbingan dan Konseling komprehensif.
- d. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) khususnya di wilayah Kalimantan Barat, dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi dalam pengembangan kompetensi profesi Bimbingan dan Konseling.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Penelitian ini bertujuan menghasilkan model pelatihan pengembangan program dengan model ASCA untuk meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling. Adapun struktur

dari disertasi ini terdiri dari lima Bab, yang masing-masing memiliki bagian pembahasan tersendiri. Pada Bab I adalah Pendahuluan, meliputi: (1) latar belakang penelitian, (2) rumusan masalah penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) Struktur organisasi disertasi.

Pada bab II adalah Kajian pustaka berisi teori-teori yang berkenaan dengan konsep; (1) Peningkatan Mutu Program Bimbingan dan Konseling, (2) Konsep Pelatihan pengembangan Program Model ASCA, (3) kerangka pikir penelitian, (4) asumsi penelitian, dan (5) penelitian yang relevan.

Bab III Metode penelitian berisi meliputi: (1) desain penelitian, (2) lokasi dan partisipan penelitian, (3) instrumen penelitian, (4) teknik analisis data, (5) prosedur penelitian. Bab IV diuraikan hasil penelitian serta pembahasannya dengan sistematis penyajian berdasarkan pertanyaan penelitian yaitu deskripsi tentang; (1) mutu program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri Kota Pontianak, (2) rumusan pelatihan akuntabilitas program model ASCA untuk meningkatkan mutu program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri se-Kota Pontianak, dan (3) Efektifitas, (4) Kebaruan penelitian, serta (5) keterbatasan penelitian. Dan yang terakhir adalah Bab V meliputi ; (1) simpulan, (2) implikasi, dan (3) rekomendasi hasil penelitian.